

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Partisipasi

2.1.1.1 Definisi Partisipasi

Banyak ahli yang memahami konsep partisipasi. Secara etimologis, istilah “partisipasi” berasal dari kata Bahasa Inggris *participation* yang memiliki makna keterlibatan atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Menurut Bappeda (2017) dalam (Putri et al., 2025:22) menjelaskan bahwa partisipasi mulai dikenal sejak tahun 1980-an yaitu melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi ini tidak hanya diartikan sebagai kehadiran dalam kegiatan, tetapi juga mencakup keterlibatan secara aktif baik secara emosional maupun proses pengambilan keputusan. Dengan demikian keterlibatan masyarakat tidak terbatas pada kehadiran fisik saja, tetapi juga mencakup penyampaian pendapat, aspirasi, serta kontribusi dalam menentukan arah pelaksanaan. Sementara itu, menurut Abidin (2023) dalam (Putri et al., 2025:22) partisipasi dipahami sebagai keterlibatan secara sukarela individu dalam mendukung suatu program tanpa disadari oleh kepentingan imbalan pribadi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa partisipasi muncul dari rasa kesadaran, tanggung jawab bersama, dan kepedulian terhadap tujuan yang ingin dicapai, bukan karena dorongan paksaan atau keuntungan materi.

Menurut (Adil Siswanto, 2024:12) partisipasi diartikan sebagai wujud keterlibatan langsung dari masyarakat, baik secara individu, maupun melalui kelompok atau organisasi dalam suatu kegiatan bersama. Melalui partisipasi, masyarakat berkesempatan untuk saling berbagi informasi, menyampaikan pandangan serta kepentingannya, dan memiliki peran yang mampu mempengaruhi suatu keputusan atau hasil tertentu secara nyata. Ada pula menurut (Mardijono, 2008:19) mengemukakan bahwa partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan, baik dalam bentuk pernyataan, maupun tindakan. Adapun Menurut (Mustanir Ahmad dkk, 2022 : 32) partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang

alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Selanjutnya Menurut (Setiawan Agustina, 2022), dalam (Herjun, 2024:282) partisipasi yaitu sebagai bentuk kontribusi terorganisasi yang dilakukan masyarakat untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan umum pemerintah. Posisi pemerintah dan masyarakat adalah setara dan saling membutuhkan satu sama lain atau sering dikenal dengan hubungan kemitraan. Selain itu, partisipasi Menurut Theresia dkk (dalam Rizal, 2022: 56) mengartikan bahwa partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Ada pula menurut Sastrodipoetra dalam (Supriani et al., 2021:11) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk kepentingan bersama. Sedangkan menurut (Arifudin, 2020) dalam (Amanda Sari et al., 2021:11) menyatakan bahwa partisipasi yaitu sebagai keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam sosialisasi. Teori partisipasi merupakan salah satu jenis teori yang membicarakan mengenai proses keterlibatan individu dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kemasyarakatan.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam suatu kegiatan yang diwujudkan melalui kontribusi pemikiran, tenaga, maupun sumber daya lainnya. Partisipasi juga mencerminkan adanya hubungan timbal balik yang memberikan manfaat bagi pihak-pihak terlibat. Dengan adanya partisipasi, hubungan antara masyarakat dan penyelenggara program akan menjadi lebih kuat. Karena, terjalin kemitraan, transparansi, dan tanggung jawab bersama.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Partisipasi

Menurut Mulyadi dalam (Maritim et al., 2025:11), bahwa partisipasi dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pengambilan manfaat, pelaksanaan, dan evaluasi. Keempat jenis tersebut apabila dilakukan bersama-sama, maka akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai jenis-jenis partisipasi menurut Mulyadi dalam (Maritim et al., 2025:11), yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut (Sinaga, 2023) dalam (Pangaribuan et al., 2024:592) Pengambilan keputusan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar. Dimana seseorang menentukan pilihan dari beberapa opsi yang ada, guna mencapai suatu tujuan. Teori pengambilan keputusan yaitu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan memilih suatu alternatif dari berbagai pilihan yang tersedia. Proses ini menjadi cara cepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan, serta menjadi momen penting ketika menghadapi berbagai tantangan (Makki & Nurjaman, 2022:92) Adapun menurut (Ningrum & Sukmana, 2023:54) Pengambilan keputusan memiliki peran penting dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Dalam pelaksanaannya, pengambilan keputusan juga melibatkan berkomunikasi dengan pihak terkait, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, berkolaborasi dengan rekan kerja, dan akhirnya membuat keputusan berdasarkan data dan analisis yang tersedia. Partisipasi dalam pengambilan keputusan merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam menentukan pilihan atau kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan bersama melalui proses musyawarah.
- b. Tahapan pelaksanaan merupakan hal yang penting. Dimana keputusan-keputusan telah dirumuskan sebelumnya dan diterapkan melalui tindakan nyata masyarakat. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjalankan program yang telah direncanakan sebelumnya. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan program tersebut.

Adapun empat indikator dari partisipasi dalam pelaksanaan Mulyadi dalam (Maritim et al., 2025:11), antara lain:

- a. Melibatkan masyarakat dalam melaksanakan partisipasi, yaitu masyarakat wajib atau diwajibkan untuk selalu aktif untuk menjamin kelancaran kegiatan.
- b. Bersedia menyumbangkan pemikiran yang berarti mampu untuk menyumbangkan gagasan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi.
- c. Kesiediaan memberikan uang atau barang materi. Yaitu uang sebagai alat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, dan orang-orang tersebut biasanya perlu berpartisipasi agar kegiatan berhasil.

- d. Tanggung jawab partisipasi yaitu memenuhi komitmen dan berpartisipasi dalam peningkatan keberhasilan kegiatan, karena pelayanan harus ditingkatkan agar masyarakat puas dengan kinerjanya.
- e. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, berkaitan dengan sejauh mana masyarakat dapat merasakan dan memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan program. (Rahmanita Fauzia & Arieffiani, 2020:53) Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas hasil yang dapat dicapai dengan dilaksanakannya program. Dari sudut pandang kualitas, keberhasilan program ditandai dengan peningkatan output. Di sisi lain, dari perspektif kualitas, hal ini menunjukkan seberapa sukses program yang dilaksanakan dan apakah sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- f. Evaluasi merupakan tahapan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dengan melihat kesesuaian antara hasil yang dicapai dan tujuan yang telah ditetapkan (Novalinda et al., 2020:139). Selain itu, Menurut teori (Suharto, 2020) dalam (Zafira & Widiyarta, 2025:42) bahwa partisipasi evaluatif harus mengedepankan keterbukaan informasi, transparansi hasil evaluasi, dan dialog yang inklusif. Sehingga masyarakat dapat berperan sejajar dalam menentukan prioritas perbaikan. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan program secara keseluruhan. Tujuan dari partisipasi ini yaitu untuk memeriksa apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau terdapat penyimpangan.

Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa penjelasan di atas bahwa keempat jenis partisipasi tersebut mencerminkan peran aktif masyarakat sejak proses perencanaan hingga penilaian akhir, sehingga keberadaannya menjadi faktor penentu dalam tercapainya tujuan pembangunan. Dan apabila seluruh bentuk partisipasi ini dapat dijalankan secara terpadu, maka akan terciptanya proses pembangunan yang lebih efektif, berkesinambungan, serta mampu meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 2.1 Jenis Partisipasi

Tahap	Deskripsi
Pengambilan Keputusan	Penentuan pilihan dengan masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama
Pelaksanaan	Penggerakan sumber daya dan dana dalam suatu pelaksanaan program yang merupakan penentu keberhasilan program
Pengambilan manfaat	Partisipasi berkaitan dari kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program yang bisa di capai
Evaluasi	Berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan

(Sumber: Dwiningrum, 2011:63)

2.1.1.3 Bentuk Partisipasi

Ditinjau dari teori Menurut Huraerah dalam (Fitrisna Widyasari et al., 2022:96) bentuk partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai cara, seperti kontribusi dalam bentuk materi, tenaga, maupun pemikiran. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi melalui keterampilan yang dimiliki serta keterlibatan aktif dalam kegiatan bersama. Sejalan dengan hal itu, Menurut Effendi dalam (Paloon et al., 2016) partisipasi ada dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

- a. Partisipasi vertikal merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam suatu program yang diselenggarakan oleh pihak lain, dimana masyarakat berperan, namun berada terhadap posisi sebagai pihak yang lebih rendah atau bawahan.
- b. Partisipasi horizontal merupakan bentuk keterlibatan masyarakat yang memungkinkan adanya inisiatif dari setiap anggota atau kelompok, dimana mereka saling berinteraksi satu sama lain. Partisipasi ini tampak dalam kegiatan bersama antar anggota masyarakat maupun dalam kerja sama dengan pihak lain.

Selain itu, bentuk partisipasi yang nyata Menurut (Anggini Debora Monika et al., 2025).

- a. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam suatu kegiatan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sumbangan masyarakat dalam bentuk materi (barang).
- b. Partisipasi harta benda yaitu partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, yang biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
- c. Partisipasi tenaga yaitu partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang untuk keberhasilan suatu program. Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu masyarakat tidak semua berpartisipasi secara penuh, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan, perbedaan antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya.
- d. Partisipasi keterampilan, yaitu dengan memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.
- e. Partisipasi buah pikiran, yaitu partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan kegiatan yang diikutinya.

Selain itu bentuk partisipasi Menurut Oakley dalam Buku (Remiswal, 2013:31) partisipasi memiliki tiga makna utama. Pertama, partisipasi dapat dipahami sebagai bentuk kontribusi, yakni keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan pembangunan. Kedua, partisipasi juga dimaknai sebagai organisasi, yaitu wadah atau sarana yang memungkinkan masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam proses pembangunan. Ketiga, partisipasi diartikan sebagai pemberdayaan, yakni usaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar mereka mampu menentukan sendiri tingkat keterlibatannya dalam kegiatan pembangunan.

Dapat disimpulkan bahwa setiap bentuk partisipasi tersebut mencerminkan peran masyarakat yang sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, sehingga bersama-sama dapat mendukung keberhasilan program yang dijalankan.

2.1.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Menurut Suharto (2009:8) dalam Buku (Hutagalung, 2022:55) bahwa faktor keterlibatan masyarakat sangat penting, karena masyarakat harus berpartisipasi dalam memberdayakan mereka sendiri karena tujuan, cara dan hasil yang harus dirumuskan oleh mereka sendiri. tingkat kesadaran masyarakat merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat mendorong tindakan bagi perubahan pemberdayaan. Menurut Wrihatnolo dan Nugroho (2007: 68) dalam (Hutagalung, 2022:55) ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi diantaranya:

a. Keterbatasan Dana

Dwiningrum, (2011:57) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat partisipasi yaitu karena ekonomi masyarakat atau keterbatasan dana.

b. Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat

Kesadaran dapat dimaknai sebagai kemampuan individu dalam memahami suatu kondisi serta memberikan respons yang sesuai terhadap situasi yang dihadapi. (Ari Shandy & S. Ag, 2022:730). Menurut Poedjawatna (dikutip oleh Amos Neolaka) dalam (Maskhuroh & Hasibuan, 2025:728) menambahkan bahwa kesadaran meliputi aspek pengetahuan, pemahaman, serta kepekaan individu terhadap suatu kondisi, termasuk kemampuan dalam membedakan yang baik dan kurang baik. Dengan demikian, kesadaran masyarakat dapat dipahami sebagai kondisi dimana individu dalam kelompok sosial memiliki pemahaman terhadap nilai dan norma, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan bersama melalui sikap saling menghargai dan bekerja sama.

c. Lemahnya Pemahaman Masyarakat

Lemahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur maupun tahapan pelaksanaan kegiatan yang terjadi, salah satunya disebabkan oleh rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan. Selain itu juga, yang menjadi penyebab lemahnya pemahaman masyarakat yaitu karena tidak semua masyarakat memiliki dan mendapatkan pendidikan yang cukup. Karena,

sejalan dengan hal itu, Menurut Benyamin S. Bloom dalam (Rismawati, 2022:10) pemahaman merupakan proses kognitif yang memungkinkan seseorang mengolah pengetahuan sehingga mampu membentuk cara pandang yang tepat terhadap suatu hal.

d. Kesibukan Masyarakat

Menurut Dwiningrum, (2011:57) dalam (Hutagalung, 2022:58) yang menjadi faktor penghambat dalam partisipasi yaitu rendahnya motivasi untuk berubah serta kurangnya kemauan dalam berpartisipasi dapat menjadi hambatan dalam keterlibatan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi menurut Dusseldorp (Yandti, dkk., 2018 dalam Yunita & Idrus, 2023:64), yakni

- 1) Partisipasi bebas yaitu keterlibatan individu yang dilakukan secara sukarela dalam suatu kegiatan. Partisipasi ini terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Partisipasi spontan, yaitu keterlibatan yang muncul dari kesadaran dan keyakinan pribadi tanpa adanya dorongan atau pengaruh dari pihak lain.
 - b) Partisipasi terbujuk, yaitu jika seseorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela di dalam aktivitas kelompok tertentu
- 2) Partisipasi terpaksa dapat terjadi dalam berbagai cara, yaitu partisipasi terpaksa dengan keadaan sosial ekonomi.

Selain itu, menurut (Slamet, 1994) dalam (Purwandari et al., 2016:381) faktor yang mempengaruhi partisipasi yaitu sebagai berikut:

- a) Faktor Internal, yaitu dari faktor sosial (Tingkat pendidikan), kondisi ekonomi (Jenis pekerjaan), perubahan sikap dan tingkah laku (Intensitas kehadiran, informasi, serta komunikasi).
- b) Faktor eksternal, yaitu sejauh mana individu terlibat dalam lingkungan sosial. Seperti:
 - 1) Intensitas sosialisasi, yaitu mempengaruhi partisipasi masyarakat karena sosialisasi aktif dari pemerintah akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- 2) Stimulus dari pihak luar, yaitu mempengaruhi partisipasi masyarakat karena hal itu dibutuhkan dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.
- 3) Keaktifan fasilitator, keaktifan tersebut sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat karena fasilitator sangat dibutuhkan dalam pendampingan program partisipasi masyarakat.
- 4) Pengaruh masyarakat dari luar, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena masyarakat yang semakin mudah terhubung satu dengan yang lain akan mudah mendapat pengaruh dari luar.

Dengan demikian, kesibukan mencerminkan kondisi dimana masyarakat lebih memprioritaskan aktivitas lain sehingga keterlibatan dalam kegiatan sosial menjadi terbatas.

2.1.1.5 Fungsi dan Manfaat Partisipasi

Menurut Carter dalam (Maritim et al., 2025:96) partisipasi masyarakat memiliki berbagai fungsi penting dalam pelaksanaan program, diantaranya sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, sebagai strategi dalam mencapai tujuan, sebagai sarana komunikasi antar pihak, sebagai media penyelesaian konflik, serta sebagai upaya pemberdayaan sosial.

Adapun partisipasi manfaatnya yaitu sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat memberikan berbagai manfaat dalam pelaksanaan program. Keterlibatan masyarakat dapat mendorong terbentuknya rasa tanggung jawab bersama, memperkuat proses pembelajaran sosial, serta mengurangi kesenjangan atau rasa keterasingan di lingkungan masyarakat. Selain itu, partisipasi juga berperan dalam meningkatkan dukungan terhadap kebijakan yang dijalankan, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya suatu kegiatan, serta membantu menghasilkan keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi juga menjadi sumber informasi yang berharga sekaligus mencerminkan adanya komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat, khususnya dalam hal kontribusi, rasa tanggung jawab, serta kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

2.1.1.6 Tingkat Partisipasi

Menurut (Harun, 2011:21) partisipasi dapat dikategorikan menjadi tujuh tangga partisipasi.

- a. Partisipasi pasif/manipulatif, yaitu kondisi dimana masyarakat hanya menerima informasi terkait kegiatan tanpa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau terlibat lebih jauh.
- b. Partisipasi informatif. Pada tahap ini, masyarakat berperan sebatas sebagai pemberi informasi, misalnya dengan menjawab pertanyaan, namun tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Partisipasi konsultatif, yaitu terjadi ketika masyarakat dimintai pendapat atau masukan, tetapi keputusan akhir tetap berada di pihak penyelenggara program.
- d. Partisipasi insentif. Pada tingkat ini, masyarakat terlibat dalam kegiatan dengan imbalan tertentu, sehingga partisipasi yang dilakukan cenderung didorong oleh adanya keuntungan yang diterima.
- e. Partisipasi fungsional, yaitu ditandai dengan terbentuknya kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan program, meskipun pada awalnya masih bergantung pada pihak luar sebelum akhirnya berkembang menuju kemandirian.
- f. Partisipasi interaktif. Pada tahap ini, masyarakat terlibat secara aktif dalam proses analisis, perencanaan, hingga pelaksanaan kegiatan, serta memiliki peran dalam mengendalikan keputusan yang diambil.
- g. *Self mobilization* (mandiri, yaitu bentuk partisipasi tertinggi, di mana masyarakat secara mandiri mengambil inisiatif tanpa ketergantungan pada pihak luar.

Tujuh tangga partisipasi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan menurut (Nahrowi, 2023) yaitu tingkat tinggi yang mencerminkan keterlibatan aktif, tingkat sedang yang menunjukkan keterlibatan terbatas, serta tingkat rendah yang ditandai dengan minimnya peran masyarakat dalam kegiatan.

2.1.3 Posyandu

2.1.3.1 Definisi Posyandu

Dalam buku Gizi dan Tumbuh Kembang Anak di Indonesia menurut (Syarifudin et., al 2024) dalam (Septariana et al., 2024:138) posyandu merupakan

wadah pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang mempertemukan tenaga kesehatan dan warga dalam upaya menangani berbagai permasalahan kesehatan secara bersama. Selain itu, posyandu juga mempunyai peran menyeluruh dalam mendeteksi dini, memberikan pengobatan, serta konseling terkait kesehatan bagi masyarakat. Keberadaannya sangat membantu dalam memonitor perubahan status gizi balita melalui pencatatan dan pelaporan berat badan balita yang dilakukan setiap bulan di posyandu (Syarif dkk., 2023) dalam (Septariana et al., 2024:138). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023, hlm.10), pengelolaan posyandu dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) posyandu. Dalam tugas ini menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Saat ini posyandu telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga tingkat desa. Posyandu dapat dipahami sebagai salah satu bentuk layanan kesehatan dasar yang diselenggarakan di tingkat masyarakat untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak. Selain itu, posyandu juga menawarkan imunisasi, pemeriksaan gizi, serta edukasi kesehatan untuk masyarakat (Taufiq et al., 2023:431). Posyandu berperan penting dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, agar efektif posyandu dituntut untuk memiliki kapasitas yang memadai dalam menangani persoalan tersebut. Menurut Effendy (1998:93), posyandu merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan, yang dijalankan oleh kader dan terlatih melalui pendidikan serta pembinaan dari puskesmas terkait pelayanan kesehatan. Ada pula (Sintiawati et al., 2021:93) posyandu merupakan suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan Keluarga Berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini (Wahyuningsih et al., 2023:2).

Ada pula Menurut Hasibuan, L.S.(2021:17), posyandu merupakan perpanjangan layanan puskesmas yang menyelenggarakan pemantauan dan pelayanan kesehatan secara terpadu. Posyandu menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup, sehingga mampu meratakan akses layanan kesehatan. Kegiatan posyandu

mencakup imunisasi, edukasi gizi, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, posyandu tersebut rutin dalam mengadakan pemantauan tumbuh kembang balita, konseling gizi, serta pelayanan gizi dan kesehatan dasar lainnya. Posyandu juga berperan sebagai pusat layanan sosial dasar keluarga dalam aspek pemantauan pertumbuhan anak, yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif, integratif, dan saling mendukung antar program. Dalam pelayanan ini disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan tetap berlandaskan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan menurut (Savitri et al., 2024:3) posyandu termasuk dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola secara bersama oleh warga dengan dukungan tenaga kesehatan, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara mandiri. Posyandu yang mengikuti program prioritas (KB, KIA, Gizi, imunisasi dan penanggulangan Diare) dan terbukti mempunyai daya ungkit besar terhadap penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu (Kemenkes RI, 2020). Posyandu diselenggarakan di setiap desa/kelurahan/RT/RW yang dibangun oleh swadaya masyarakat yang bekerjasama dengan pihak kesehatan seperti puskesmas.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa posyandu merupakan sarana pelayanan kesehatan dasar yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kualitas kesehatan terutama bagi ibu dan anak.

2.1.3.2 Manfaat posyandu

Posyandu merupakan salah satu layanan kesehatan dasar yang diselenggarakan di tingkat masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif warga, khususnya ibu dan anak. Posyandu berfungsi sebagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Posyandu merupakan inti dari kegiatan masyarakat di bidang kesehatan dengan menyelenggarakan pelayanan keluarga berencana, gizi, vaksinasi, pengobatan diare, dan KIA (Saepuddin et al., 2017) dalam (Ramadani et al., 2025:81). Posyandu juga memegang peranan penting yang secara langsung untuk mengatasi permasalahan sosial, dimana di dalamnya juga terdapat masalah kesehatan masyarakat (Sari et al., 2019). Menurut (Handayani, 2019:25) posyandu memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, antara lain mempermudah akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan balita. Melalui

kegiatan rutin seperti penimbangan berat badan, pertumbuhan anak dapat dipantau secara berkala sehingga risiko gangguan gizi dapat dicegah sejak dini. Selain itu, posyandu juga menjadi sarana pemberian vitamin A bagi bayi dan balita sebagai upaya menjaga kesehatan mereka.

Adapun manfaat posyandu dalam Buku Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu Kementerian Kesehatan RI (2011:13) bekerja sama dengan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal Posyandu).

- a. Manfaat dari penyelenggaraan posyandu dapat dilihat dari berbagai sisi. Yaitu bagi masyarakat, bahwa keberadaan posyandu dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi serta pelayanan kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian anak balita (AKABA). Selain itu, masyarakat juga dapat menerima layanan yang lebih profesional dalam penanganan permasalahan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Dengan adanya layanan posyandu, masyarakat juga dapat lebih efisien dalam mengakses pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan sosial sektor lain yang berhubungan.
- b. Bagi masyarakat, keberadaan posyandu memberikan kemudahan dalam memperoleh layanan kesehatan dasar serta informasi yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, posyandu juga berperan dalam mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan efisiensi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

2.1.3.3 Tujuan Posyandu

Tujuan posyandu menurut (Supri & Zulfira, 2024:12) yaitu untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak, melalui pelayanan yang mudah dijangkau dan berkelanjutan. Selain itu, menurut Effendy dalam (Hasibuan, L. S. 2021:18) posyandu juga bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat. Tujuan posyandu juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan kesehatan secara mandiri di lingkungannya, meningkatkan keterjangkauan layanan kesehatan, serta mendorong keikutsertaan masyarakat secara lebih aktif dalam mendukung program kesehatan. Selain itu

fungsi utamanya yaitu untuk memberdayakan masyarakat serta memfasilitasi kesejahteraan mereka dengan memberikan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Dengan demikian, tujuan utama dari pelaksanaan program pelayanan posyandu yaitu terciptanya masyarakat yang sejahtera, yang ditandai oleh kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap pekerjaan dan peningkatan penghasilan (Saepuddin et al., 2018:206). Ada pula tujuan posyandu menurut (Yosephina Elizabeth et al., 2024:200) yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pemantauan kesehatan secara rutin, pemberian imunisasi, serta penyuluhan mengenai kesehatan ibu dan anak.
- b. Meningkatkan gizi balita, yaitu posyandu memantau pertumbuhan serta perkembangan balita dan memberikan penyuluhan tentang gizi yang baik untuk mencegah serta mengatasi masalah malnutrisi.
- c. Menyediakan akses pelayanan kesehatan, bahwa posyandu memberikan akses pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Berikut ada beberapa tujuan dari kegiatan posyandu dalam Buku Model Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Jayapura menurut Schiller dan Antlov (Hetifah, 2003:152) dalam (Fatimah, 2022:44) Merumuskan visi dan misi serta nilai-nilai yang dianut atau menjadi dasar suatu organisasi serta visi itu ke depan

- a. Membangun rencana, yaitu setelah melakukan perumusan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Maka dengan bekal itu dapat segera dibuat suatu proses lanjutan untuk membangun rencana
- b. Mengumpulkan gagasan yaitu dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis, untuk mengumpulkan sebanyak mungkin gagasan dari semua orang yang menjadi peserta proses partisipasi
- c. Membuat pilihan, yaitu bertujuan untuk mengorganisir berbagai ide yang muncul dalam proses partisipasi.
- d. Masukan, yang bertujuan untuk pertukaran informasi, gagasan dan kepedulian tentang suatu isu atau rencana antara pemerintah, dengan masyarakat.

- e. Mengumpulkan informasi, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan atau peluang serta bagaimana untuk mengoptimalkannya, selain mengidentifikasi kelemahan dan ancaman untuk mempermudah merumuskan langkah-langkah untuk mengatasinya.

Dapat disimpulkan dari beberapa penjelasan di atas, bahwa pada hakikatnya tujuan partisipasi yaitu untuk memberdayakan masyarakat daerah setempat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, serta menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

2.1.3.4 Kegiatan dan Sistem Kerja Posyandu

Pelaksanaan kegiatan posyandu melibatkan peran puskesmas sebagai pembina serta masyarakat yang berpartisipasi sebagai kader. Keberlangsungan kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan kader dalam menjalankan tugasnya. Keberlangsungan kegiatan ini sangat bergantung terhadap partisipasi aktif dari kader posyandu tersebut. Keaktifan kader posyandu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor dari luar kader posyandu maupun faktor dari dalam kader posyandu. Persentase kader aktif secara nasional yaitu 69,29% dan angka drop-out kader sekitar 30,8% (Adisasmito, 2021). Adapun menurut Hasibuan, L. S. (2021:19) yaitu kegiatan posyandu meliputi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi peningkatan gizi, penanggulangan diare, sanitasi dasar, dan penyediaan obat esensial. Menurut Muninjaya & Hasibuan, L. S. (2021:19) sistem kerja di posyandu yaitu tergantung ketersediannya sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan posyandu. Contohnya kelengkapan bangunan, meja dan kursi, perlengkapan penimbangan, perlengkapan dana yang menunjang kegiatan, serta bagaimana persiapan mekanisme pelayanannya. Sistem kerja posyandu selanjutnya yaitu proses pelayanan posyandu, yang di dalamnya terdapat pengorganisasian, dimana kejelasan perencanaan tugas dan alur kerja. Pelaksanaan yang mencakup program pokok yang dilaksanakan (pendaftaran, penimbangan, dan pencatatan penyuluhan). Pembinaan yaitu dimana kegiatan pemantauan yang terjadwal dan terencana dengan baik, serta pelaksanaan tiap bulan.

Sejalan dengan itu jadi dapat disimpulkan bahwa posyandu merupakan wadah pelayanan kesehatan dasar yang dikelola langsung oleh masyarakat bersama

tenaga kesehatan untuk mendekatkan layanan kesehatan terutama bagi ibu hamil, anak, dan juga balita.

2.1.3.5 Program Posyandu

(Sujudi, 2012) Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan sumberdaya Masyarakat (UKBM) yang diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi ibu, bayi, dan balita. Posyandu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau.

Kegiatan Posyandu terdiri atas beberapa program utama, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), imunisasi, gizi, serta pencegahan.

a. Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan program yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, dan balita. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program KIA meliputi pemeriksaan kehamilan, pemantauan kesehatan ibu hamil, penyuluhan kesehatan ibu dan anak, konsultasi persiapan persalinan, pemberian tablet tambah darah, pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita, serta pelayanan kesehatan bagi ibu menyusui.

b. Program Imunisasi

Program imunisasi bertujuan meningkatkan kekebalan tubuh bayi dan balita terhadap berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian imunisasi dasar lengkap seperti BCG, Polio, DPT-HB-Hib, Campak, dan Hepatitis B sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah.

c. Program Gizi

Program gizi bertujuan memantau dan meningkatkan status gizi ibu dan anak. Kegiatan yang dilakukan meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian vitamin A, penyuluhan gizi, deteksi dini gangguan pertumbuhan, pemberian makanan tambahan (PMT), serta Pemberian Makanan Bergizi (MBG).

Pelayanan kesehatan dasar di posyandu mencakup beberapa aspek utama yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak, program keluarga berencana, imunisasi, serta pemenuhan gizi masyarakat. (Syarif dkk., 2023 dalam buku (Septariana et al., 2024:138) Selain pelayanan utama tersebut, posyandu juga menyelenggarakan berbagai program pendukung melalui kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

- a. Salah satu program yang dilaksanakan di posyandu adalah pemantauan kesehatan ibu hamil dan anak melalui pemeriksaan rutin, pemberian imunisasi, serta penyuluhan kesehatan kepada keluarga.
- b. Kegiatan Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bagi anak, maupun sasaran posyandu. Program ini memanfaatkan bahan pangan lokal serta disertai dengan edukasi gizi kepada orang tua. Selain pemberian makanan, kegiatan ini juga diiringi dengan penyuluhan mengenai pola makan sehat guna meningkatkan pemahaman masyarakat (Halim et al., 2024:181)
- c. Pemberian Makan Bergizi (MBG) ditujukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk memenuhi kebutuhan gizi pada masa pertumbuhan awal kehidupan. Program ini dilaksanakan secara berkala melalui posyandu maupun puskesmas, dengan mekanisme distribusi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Penyaluran Makan Bergizi (MBG) saat ini dilakukan 2 kali dalam seminggu melalui puskesmas dan posyandu. Kedepannya, program ini direncanakan akan dijalankan setiap hari. Terdapat dua skema penyaluran Makan Bergizi (MBG) yang disiapkan yaitu:

- a. Posyandu mengantarkan makanan langsung ke rumah-rumah penerima yang termasuk dalam kelompok sasaran Makan Bergizi (MBG), dengan penyesuaian jadwal yang telah ditetapkan
- b. Penerima manfaat datang langsung ke posyandu untuk menerima Makan Bergizi (MBG) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- c. Pemantauan status gizi dan perkembangan anak dilakukan melalui pengukuran tinggi dan berat badan secara berkala serta pencatatan dalam buku kesehatan ibu dan anak.

- d. Pemberian Vitamin A merupakan salah satu upaya untuk menjaga kondisi kesehatan anak serta mencegah gangguan yang disebabkan oleh kekurangan vitamin tersebut.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk memperkuat kajian dalam penelitian ini, peneliti menelaah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zafira & Widiyarta, 2025) yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Posyandu di Kota Surabaya”** mengkaji tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan posyandu, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap manfaat posyandu, peran tokoh masyarakat, serta kualitas pelayanan yang diberikan.

Selanjutnya, penelitian (Agustina, 2017) yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Posyandu Di Kecamatan Sidoarjo”** meneliti bentuk partisipasi masyarakat serta faktor yang mempengaruhi keterlibatan tersebut dalam kegiatan posyandu di Kecamatan Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan kader cukup berperan dalam meningkatkan kehadiran masyarakat. Namun demikian, partisipasi ibu balita masih cenderung tidak stabil, yang disebabkan oleh kurangnya minat, keterbatasan informasi, serta kendala waktu pelaksanaan kegiatan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Village et al., 2022) yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Posyandu di Desa Sidomulya Kecamatan Stabat, Sumatera Utara”** yaitu membahas mengenai tingkat kehadiran ibu balita dalam kegiatan posyandu. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masih rendah, yang dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat, minimnya informasi terkait jadwal kegiatan, serta keterbatasan akses menuju lokasi posyandu.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Yunita M. et al., 2025) yang berjudul **“Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat pada**

Kegiatan Posyandu di Desa Oben Kabupaten Kupang” hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, kemudahan akses, serta dukungan keluarga dan tokoh masyarakat. Adapun hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan fasilitas serta rendahnya kesadaran sebagian ibu untuk rutin mengikuti kegiatan.

Penelitian oleh (Hariyanti, 2024)) dengan judul **“Analisis Partisipasi Ibu dalam Membawa Balita ke Posyandu di Wilayah Puskesmas Banda Raya, Kota Banda Aceh Tahun 2023”** bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kehadiran ibu dalam kegiatan posyandu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kehadiran ibu dalam kegiatan posyandu dipengaruhi oleh jarak lokasi yang cukup jauh, kesibukan ibu bekerja, serta adanya layanan kunjungan rumah dari kader yang menyebabkan sebagian ibu merasa tidak perlu datang langsung ke posyandu.

2.3 Kerangka konseptual

Kerangka konseptual disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur dan arah penelitian yang dilakukan. Kerangka konseptual dalam penelitian ini terdiri atas lima tahapan, yaitu permasalahan di lapangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu, kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemantauan tumbuh kembang balita, adanya ketergantungan masyarakat terhadap Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta belum optimalnya peran kader posyandu. Kemudian Input dari penelitian ini terdiri dari kader posyandu, masyarakat, dan petugas kesehatan. Proses dalam penelitian ini yaitu menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan teori Mulyadi dalam (Anggini et al., 2025:11). Melalui analisis terhadap kelima bentuk partisipasi tersebut, diperoleh output berupa tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Adapun outcome yang diharapkan dari penelitian ini adalah meningkatnya derajat kesehatan gizi masyarakat. Pada tahap proses, penelitian ini berfokus pada analisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu Anggrek dan tingkat partisipasi masyarakat yang meliputi partisipasi uang, harta benda, tenaga, keterampilan, dan buah pikiran. Kelima bentuk partisipasi tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan

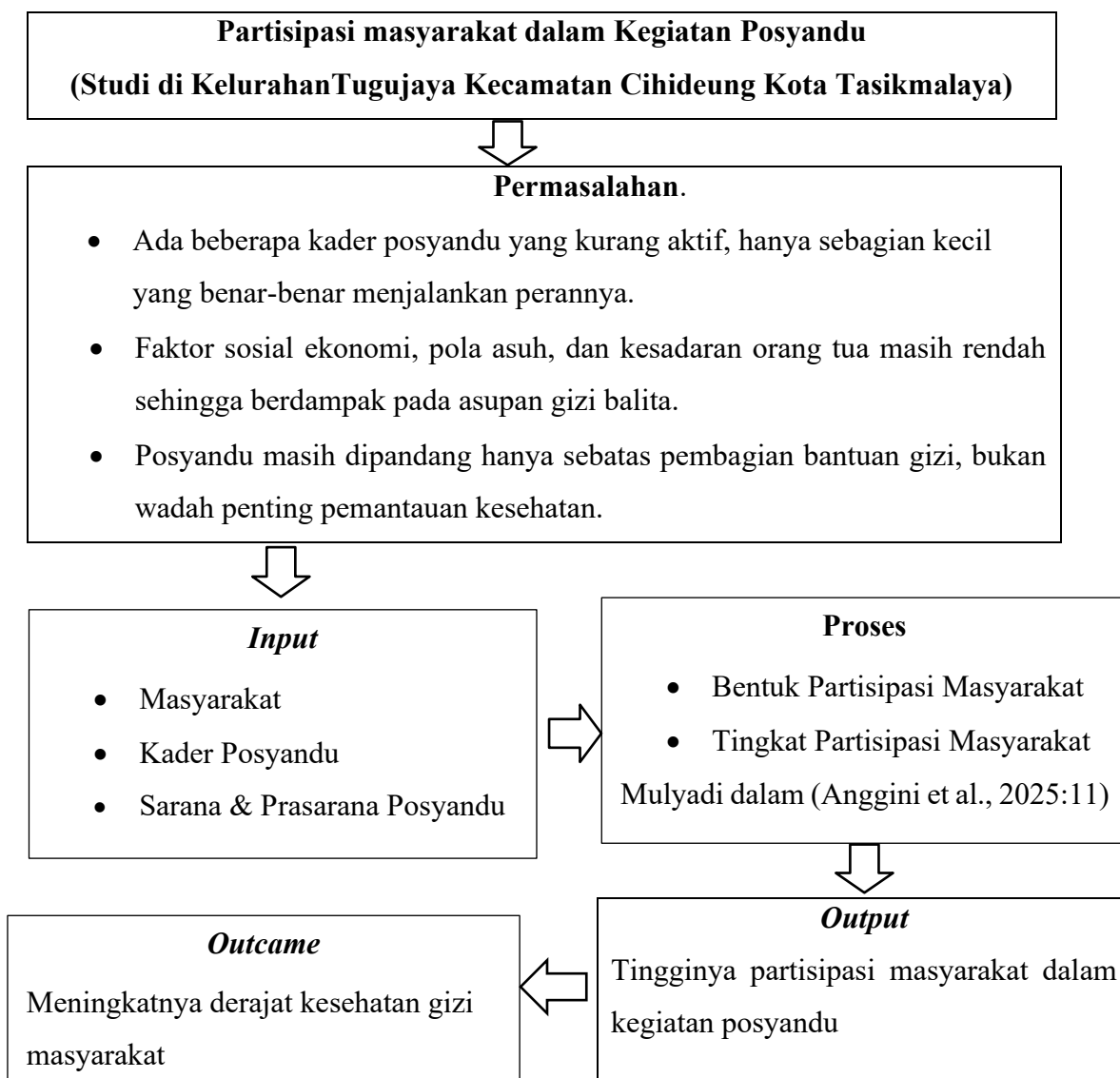
masyarakat dalam mendukung pelaksanaan berbagai program dan pelayanan posyandu.

Partisipasi uang diwujudkan melalui kontribusi dana yang diberikan secara sukarela oleh masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan kegiatan posyandu, terutama dalam pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), penyediaan konsumsi, serta kebutuhan lain yang menunjang pelayanan kesehatan. Partisipasi harta benda ditunjukkan melalui penyediaan maupun peminjaman berbagai sarana, prasarana, dan bahan yang dibutuhkan selama kegiatan posyandu berlangsung, seperti kursi, meja, alat pendukung kegiatan, serta bahan makanan berupa telur, kacang hijau, nasi, dan lauk-pauk yang digunakan dalam kegiatan PMT. Partisipasi tenaga tercermin dari kehadiran dan keterlibatan langsung masyarakat dalam berbagai kegiatan posyandu, seperti penimbangan balita, pelayanan gizi, pemberian vitamin A, imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, serta kegiatan pelayanan kesehatan lainnya.

Partisipasi keterampilan diwujudkan melalui pemanfaatan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh kader, tenaga kesehatan, maupun masyarakat dalam mendukung kegiatan posyandu. Bentuk partisipasi ini dapat dilihat melalui pelaksanaan penyuluhan kesehatan, penyampaian informasi mengenai gizi dan kesehatan ibu serta anak, pengolahan makanan bergizi dalam kegiatan PMT dan MBG, pencatatan administrasi posyandu, serta penerapan pengetahuan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, partisipasi buah pikiran ditunjukkan melalui keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pertanyaan, saran, masukan, pendapat, maupun gagasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan posyandu. Bentuk partisipasi ini dapat terlihat dalam kegiatan penyuluhan kesehatan, evaluasi program, maupun pembahasan mengenai pelaksanaan kegiatan posyandu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan perbedaan pada setiap bentuk partisipasi. Partisipasi tenaga menjadi bentuk partisipasi yang paling menonjol, yang tercermin dari tingginya kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penimbangan balita, pelayanan gizi, pemberian vitamin A, imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, PMT, dan MBG. Sebaliknya, partisipasi buah pikiran masih tergolong rendah

karena masyarakat belum banyak terlibat dalam penyampaian pendapat, pemberian masukan, serta proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kegiatan posyandu. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesadaran masyarakat, ketersediaan waktu, dan pemahaman mengenai pentingnya kegiatan posyandu. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antar komponen penelitian, kerangka konseptual ini disajikan dalam bentuk bagan pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

(Sumber: Peneliti, 2026)